

PRODIGY

JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

Volume 5, Nomor 1, Juli 2017

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab	: K. Johnson Rajagukguk, S.H., M. Hum.
Pemimpin Redaksi	: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Dewan Redaksi	: Mardisontori, S.Ag., LLM. Akhmad Aulawi, S.H., M.H. M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H. Khopiatuziadah, S.Ag., LLM.
Anggota Dewan Redaksi	: Yeni Handayani, S.H., M.H. Bagus Prasetyo, S.H., M.H. Nita Ariyulinda, S.H., M.H. Arif Usman, S.H., M.H. Titi Asmara Dewi, S.H., M.H. R. Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.
Mitra Bestari	: Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
Design Grafis	: Achmadudin Rajab, S.H., M.H. Noor Ridha Widiyani, S.H.
Staf Redaksi	: Sagung Agung Putu SY, S.H., M.H. Ani Maryani, S.E. Muhamad Yunus, S.H. Anita Susilawati

Alamat

Redaksi Prodigy Jurnal Perundang-Undangan
Pusat Perancangan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI
Gedung Setjen DPR RI
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Kode Pos 10270
e-mail: prodigyjurnalilmiah@gmail.com

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN
 Volume 5, Nomor 1, Juli 2017

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Pengantar Redaksi	
Lembar Abstrak	iii - xii
Artikel:.....	
Kedudukan Hukum Adat sebagai "Living Law" dalam Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia	
<i>Rachmat Wahyudi Hidayat</i>	1 - 15
Tindakan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Asing yang melakukan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Ditinjau dari Hukum Laut Internasional	
<i>Sutriyanti</i>	16 - 28
Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	
<i>Oksidelfa Yanto</i>	29 - 38
Optimalisasi Perlindungan Hak Paten dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	
<i>Maharani Siti Shopia</i>	39 - 54
Analisis Pemilihan Judul RUU tentang Pengawasan obat dan Makanan Serta Obat Asli Indonesia Ditinjau dari Ruang Lingkup Pengawasan Obat dan Makanan	
<i>Nita Ariyulinda</i>	55 - 67
Keberadaan Dokter Layanan Primer: Telaah terhadap Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	
<i>Arrista Trimaya</i>	68 - 79
Aspek Hukum Pembentukan Bank Wakaf Ventura	
<i>Akhmad Aulawi</i>	80 - 94
Menelaah Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial dalam Regulasi Partai	
<i>Wiwin Sri Rahyani</i>	95 - 105
Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
<i>R. Priharto Budiprasetya E.P.Y</i>	106 - 116

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Redaksi dapat menerbitkan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” Volume 5 Nomor 1, Juli 2017. Jurnal ini memuat topik bahasan di bidang hukum dan perundang-undangan yang merupakan hasil kajian lebih lanjut maupun elaborasi dari suatu naskah akademik dan rancangan undang-undang, analisis dari suatu peraturan perundang-undangan, kajian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kajian atas peristiwa hukum yang terjadi, kajian dan teori dari konsepsi hukum, serta gagasan dan analisis terhadap fungsi legislasi.

Dalam penerbitan ini, setiap tulisan telah melalui proses pembahasan dan penyuntingan oleh Redaksi dan telah dilakukan tinjauan secara menyeluruh oleh pembaca ahli (mitra bestari). Keseluruhan tulisan yang disajikan memuat 9 (sembilan) tulisan yang substansinya mencakup permasalahan hukum dan perundang-undangan di bidang politik, hukum, kesejahteraan sosial, ekonomi, serta industri dan pembangunan.

Keseluruhan tulisan yang disajikan dalam jurnal ini meliputi 9 (sembilan) tulisan dengan berbagai tema sebagai berikut: Kesatu, Kedudukan Hukum Adat sebagai “*Living Law*” dalam Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Tindakan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Asing yang Melakukan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Ditinjau dari Hukum Laut Internasional. Ketiga, Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Keempat, Optimalisasi Perlindungan Hak Paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Kelima, Analisis Pemilihan Judul RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan Serta Obat Asli Indonesia Ditinjau dari Ruang Lingkup Pengawasan Obat dan Makanan. Keenam, Keberadaan Dokter Layanan Primer: Telaah terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Ketujuh, Aspek Hukum Pembentukan Bank Wakaf Ventura. Kedelapan, Menelaah Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial dalam Regulasi Perbankan. Kesembilan, Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Redaksi berharap dalam setiap penerbitan Jurnal Perundang-undangan “Prodigy” tulisan yang ditampilkan dapat semakin meningkat kualitasnya baik dari sisi teknik penulisan ilmiah maupun substansi. Tentu saja kelemahan dan kekurangan masih banyak ditemui, tetapi dengan upaya perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan optimisme bagi peningkatan kualitas tulisan yang ditampilkan akan semakin lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Jakarta, Juli 2017

Redaksi

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 1, JULI 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.w

Rachmat Wahyudi Hidayat

Badan Keahlian DPR RI

Kedudukan Hukum Adat sebagai "Living Law" dalam Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Jurnal Prodigy Vol. 5 No.1, Juli 2017, halaman 1 - 15

Sebagai negara hukum Indonesia menganut paham sistem hukum eropa kontinental yang lebih mengutamakan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) daripada hukum tidak tertulis. Di sisi lain berdasarkan Pasal 18B ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195 (UUD NRI Tahun 1945), Indonesia mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya (hukum adat) yang telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum adat sebagai *living law* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain itu perlu diketahui juga mengenai sikap negara terhadap keberadaan Hukum Adat berdasarkan prinsip NKRI. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Secara umum hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berupa ketentuan atau nilai yang hidup (*living law*) yang ditaati oleh masyarakat hukum adat. Hukum adat merupakan bagian dari hukum Indonesia yang seharusnya tidak bertentangan dan bersifat saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis.

Kata kunci: negara hukum, hukum tertulis, hukum adat, nilai yang hidup

Adat Law as "Living Law" in Legislation Based on Principle of the Unitary State of the Republik of Indonesia

Prodigy Journal Vol. 5 No.1, July 2017, page 1 - 15

As a state law, Indonesia adheres to the european continental legal system that prefers the written law (regulations) rather than the unwritten law. On the other hand, based on Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republik of Indonesia, Indonesia also recognizes and respects the unity of indigenou people and its traditional rights (adat law) that existed prior to the establishment of the Unitary State of the Republik of Indonesia. This paper aims to know the position of adat law as living law in Indonesian legislation. In addition, it is also necessary to know about the state's disposition toward the existence of Adat Law based on the principle of the Unitary State of the Republik of Indonesia. Method of this writing uses juridical normative method with secondary data that analyzed qualitatively. Adat law is generally unwritten law in the form of living law which is adhered to by Indigenou peoples. Adat law is part of Indonesian law that should not be contradictory yet complementary with the regulations.

Keywords: state law, written law, adat law, living law

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO.1, JULI 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Sutriyanti

Badan Keahlian DPR RI

Tindakan Pembakaran dan Penenggelaman Kapal Asing yang Melakukan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Ditinjau dari Hukum Laut Internasional

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 1, Juli 2017, halaman 16 - 28

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairan yang sangat luas dan memiliki potensi sumber daya alam di wilayah laut yang sangat besar. Dalam kegiatan pemanfaatan potensi sumber daya alam laut Indonesia sering terjadi permasalahan salah satunya *illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing)*. Indonesia telah meratifikasi konvensi hukum laut internasional sehingga perlu dilihat pengaturan mengenai tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan *IUU Fishing* dalam konvensi tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tinjauan hukum laut internasional terkait tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia dan pengaturan sanksi dalam hukum nasional Indonesia bertentangan atau tidak dengan aturan hukum laut internasional. Tulisan ini disusun dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan melakukan pengkajian sumber-sumber kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis dengan analisis deskriptif. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum laut internasional, tidak diatur spesifik sanksi terhadap *IUU Fishing*. Tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melakukan *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum laut internasional dan bagian dari wewenang negara Indonesia untuk memberikan sanksi terhadap tindakan kapal asing yang melakukan *IUU Fishing*. Selain itu, pengaturan sanksi *IUU Fishing* oleh kapal asing telah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu berupa sanksi tegas dengan membakar dan menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *IUU Fishing*.

Kata kunci: pembakaran, penenggelaman, kapal asing, hukum laut internasional

The Buring and Sinking of the Forgen Vessel Which do Illegal Unreported, and Unregulated Fishing in Terms of International Law of The Sea

Prodigy Journal Vol. 5 No. 1, July 2017, page 16 - 28

Indonesia is archipelagic state which has large marine areas and natural resources. There are many problems in the utilization of the potential of Indonesian marine natural resources such as illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Indonesia has been ratified international convention law of the sea, therefore it is a need to consider how the convention rules of IUU Fishing penalty. This paper aims to determine the extent of review international law of the sea relating to the act of burning and sinking of foreign vessel which do IUU Fishing in Indonesian territorial waters and regulating of sanction in Indonesian national law whether contradict or not to the rule of international law of the sea. This paper uses a normative juridical approach, which is conducting a study of literatures. Once the data collected, it is analyzed using descriptive analysis. The results of this paper indicates that in term of international law of the sea perspective, the act of burning and sinking of foreign vessel which do IUU Fishing in Indonesian territorial is not contrary to the provisions of international maritime law and it is a part of the authority of the Indonesia. Furthermore, regulation of IUU Fishing penalty by foreign vessel has been regulated in Article 69 of Law Number 45 Year 2009 as revised Law Number 31 Year 2004 on Fisheries which is a strict penalty by burning and sinking every foreign vessel which do IUU fishing.

Keywords: burning, sinking, foreign vessel, international law of the sea

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO.1, JULI 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Oksidelfa Yanto

Universitas Pamulang

Tindak Pidana Pemalsuan Uang Kertas dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 1, Juli 2017, halaman 29 - 38

Beberapa waktu belakangan ini tindak pidana pemalsuan uang terjadi di beberapa daerah. Pelakunya tidak hanya satu orang, melainkan bisa lebih dari satu orang. Kejahatan pemalsuan uang ini sudah membahayakan kehidupan masyarakat, karena beredarnya uang palsu sebagai alat tukar yang sah. Dalam perspektif kajian hukum pidana tindak pidana pemalsuan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun atau seumur hidup karena pelaku dengan sengaja meniru atau memalsukan uang dengan maksud untuk diedarkan sebagai uang asli. Dari berbagai kasus kejahatan pemalsuan mata uang rupiah, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku masih relatif rendah, padahal kejahatan ini dapat mengancam kedaulatan bangsa. Sudah seharusnya tindak pidana pemalsuan uang dimasukkan kedalam kejahatan khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Sudah saatnya negara memberikan perhatian serius dengan membentuk KUHP Nasional dengan pasal-pasal yang konstruktif dan mampu memutus mata rantai para sindikat pemalsu uang. Hal ini menjadi selaras dengan rencana pembentukan KUHP nasional yang baru.

Kata kunci: tindak pidana, pemalsuan uang kertas, hukum pidana

The Crime of Counterfeiting of Banknotes in the Indonesian Criminal Law Perspective

Prodigy Journal Vol. 5 No. 1, July 2017, page 29-38

In recent times the crime of counterfeiting of money occurred in some regions. The perpetrators are not just one person, but can be more than one person. This money counterfeiting crime has already been endangering people's lives, because the circulation of counterfeit money as a legitimate currency exchange. In the perspective of criminal law, the crime of counterfeiting of banknotes constitutes a crime that prohibited by the Criminal Code and the Act Number 7 Year 2011 about Currency. The perpetrators may be punished with a maximum imprisonment of fifteen years or a lifetime because the perpetrators intentionally imitate or falsify the money with an intention to be circulated as authentic money. From various cases of counterfeiting of rupiah currency, the criminal punishment sentenced to the perpetrators is still relatively low, whereas this crime can threaten the sovereignty of the nation. The criminal act of counterfeiting money should be entered into a special crime regulated in a separate law. It is time for the state to pay serious attention by forming the National Criminal Code with constructive articles and able to break the chain of money counterfeiting syndicates. This is in line with the plan to make a new national Criminal Code Law.

Keywords: crime, banknotes counterfeiting, criminal law

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO.1, JULI 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Maharani Siti Shopia

Tenaga Ahli Komisi III DPR RI

Optimalisasi Hak Paten dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Jurnal Prodigy Vol. 4 No. 1, Juni 2016, halaman 39 - 54

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU tentang Paten) merupakan langkah penyempurnaan negara atas perlindungan hak asasi manusia yang juga mencakup perlindungan terhadap pemegang paten. Oleh karena itu, meski pengaturan mengenai paten sudah berjalan dengan baik sejak perubahan terakhir pada tahun 2001, Pemerintah dan DPR menilai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten tersebut belum cukup menjamin perlindungan terhadap hak paten. Adalah suatu hal yang wajar jika negara memberikan perlindungan kepada para inventor atau pemegang hak penemuan agar invensi atau patennya itu dapat bermanfaat bagi masyarakat luas sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan inventor. Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan mengenai kondisi pengaturan paten selama ini di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan sejauh mana UU tentang Paten menjamin perlindungan paten tersebut. Adapun tujuan penulisan adalah untuk mengetahui kondisi pengaturan dan perlindungan paten selama ini serta apa saja bentuk perlindungan yang diatur dalam UU tentang Paten. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dinamika kebutuhan yang berkembang pesat mengenai paten belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Permasalahan yang timbul adalah belum adanya peraturan pelaksana UU tentang Paten seperti Peraturan Pemerintah tentang Lisensi, Lisensi Wajib, dan sebagainya. Masalah lain yang timbul dalam hal pengajuan permohonan paten yang relatif lama dan biaya permohonan paten serta biaya pemeliharaan paten relatif masih dianggap mahal bagi inventor, yang umumnya bukan pengusaha besar. Untuk itu UU tentang Paten telah melahirkan suatu sistem baru dalam pengaturan tentang paten sehingga dapat mencapai cita-cita bangsa dalam kesejahteraan sosial. Selain itu, implikasi terhadap keuangan negara terlihat nyata karena dapat meningkatkan pelayanan dan jumlah permohonan pendaftaran paten di dalam negeri.

Kata kunci: perlindungan, inventor, paten

Optimizing Protection of Patent Right on Law Number 13 Year 2016 about Patent

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 1, July 2017, page 39 - 54

The promulgation of Law Number 13 Year 2016 About Patent (Law on Patent) is a step of state improvement on the protection of human rights and inventors. Therefore, although the regulation on patents has been going well since 2001, the Government and the House of Representatives assess Law Number 14 Year 2001 is insufficient to guarantee patent protection. It is the obligation of the state to provide protection to inventors and the right of invention so that the invention or patent can benefit the wider community while improving the quality of life and the level of the welfare of the inventor. This paper raises the issue of the existing condition of patent regulation in Indonesia and how the new Patent Law guarantees patent protection. The purpose of writing is to know the condition of patent protection and what are the forms of protection regulated in the new Patent Law. The methodology in this writing is juridical normative with the approach of legislation. The dynamics of a rapidly growing about patent need to be accommodated in Law Number 14 Year 2001 concerning Patents. The problem that raise after the issuance of Law on Patent is the absence of implementing regulations such as the Government Regulation on License and Government Regulation on Compulsory License. Other problems are the time that relatively long to fill patent applications and the cost that relatively expensive for the inventor of patent applications and patent maintenance which is generally not a big businessman. Therefore, Law on Patent has given to a new system in the regulation of Patents so as to achieve the ideals of the nation in social welfare. In addition, the implications for the State's finances are actually visible because this law can improve the service and to increase the number of applications for patent registration in the country.

Keywords: Protection, Inventor, Patent

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO.1, JULI 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Nita Ariyulinda

Badan Keahlian DPR RI

Analisis Pemilihan Judul RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan Serta Obat Asli Indonesia Ditinjau dari Ruang Lingkup Pengawasan Obat dan Makanan

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 1, Juli 2017, halaman 55 - 67

Peredaran obat dan makanan di masyarakat sangat beraneka ragam baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Peredaran obat dan makanan di masyarakat banyak menimbulkan permasalahan yaitu beredarnya obat dan makanan ilegal (tanpa izin), serta obat dan makanan dengan kandungan zat kimia berbahaya. Untuk menangani permasalahan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia (RUU POM serta Pemanfaatan OAI). Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan ruang lingkup pengawasan obat dan makanan yang menjadi kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan apakah judul rancangan undang-undang tersebut sudah tepat jika dilihat dari ruang lingkup pengawasan obat dan makanan. Tujuan penulisan adalah mengetahui lingkup pengawasan obat dan makanan yang menjadi kewenangan BPOM dan apakah judul RUU tersebut sudah tepat jika dilihat dari ruang lingkup pengawasan obat dan makanan. Metode penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen dan Sistem kesehatan Nasional (SKN), BPOM bertugas melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang bertujuan untuk menjamin persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk. Istilah obat asli Indonesia sudah tidak ada sejak undang-undang tentang farmasi dicabut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU tentang Kesehatan). Sedangkan pemanfaatan obat maupun obat tradisional merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam SKN. Jika dilihat dari kewenangan BPOM dan Kemenkes maka judul RUU POM serta Pemanfaatan OAI tidak tepat.

Kata kunci: pengawasan, obat, makanan, badan pengawasan obat dan makanan

Election Analysis of Title Bill on Medicines and Food Conservation and Original Medicines Indonesia Reviewed from Scope of Medicines and Food Consulting

Prodigy Journal Vol. 5 No. 1, July 2017, page 55 - 67

The distribution of drugs and food in the community is very diverse both from within the country and from abroad. The circulation of drugs and food in the community caused a lot of problems, namely the circulation of illegal drugs and food (without permission), as well as drugs and foods with harmful chemicals. To address these concerns, the House of Representatives proposed a bill of Drug and Food Control and Indigenous Drug Utilization. The paper raised the problems of the scope of drug and food controls under the authority of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) and whether the title of the bill is appropriate if it is viewed from the scope of drug and food control. The purpose of this writing is to know the scope of supervision of drugs and foods that are under BPOM's authority and whether the title of the bill is appropriate when viewed from the scope of drug and food control. The method of writing uses normative juridical method with the approach of legislation. Based on Presidential Decree Number 103 Year 2001 on Position, Duty, Function, Authority, Organizational Structure and Working Procedure of Non-Departmental Government Institutions and National Health System (SKN), BPOM is in charge of supervising drugs and foods aimed at ensuring safety, efficacy, and product quality requirements. The term of original Indonesian drug has not existed since the pharmaceutical law was revoked by Law No. 23 Year 1992 on Health which has been later revoked by Law No. 36 Year 2009 on Health, while the utilization of drugs and traditional medicine is the authority of the Ministry of Health as stipulated in the National Health System. Therefore, the title of the bill and Utilization of OAI is not appropriate if it is viewed from the authority of BPOM and Ministry of Health.

Keywords: supervision, medicine, food, the national agency of drug and food control

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO. 1, JULI 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Arrista Trimaya

Badan Keahlian DPR RI

Keberadaan Dokter Layanan Primer: Telaah terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 1, Juli 2017, halaman 68-79

Dokter layanan primer merupakan profesi baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU tentang Pendidikan Kedokteran). Dokter layanan primer sangat diperlukan sejalan dengan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengharuskan alur pelayanan diawali dari fasilitas primer, seperti di puskesmas, klinik pratama, dan praktik dokter mandiri. Namun, permasalahan yang timbul adalah bagaimana konsep pengaturan dokter layanan primer dalam UU tentang Pendidikan Kedokteran dan sinkronisasinya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU tentang Praktik Kedokteran), yang hanya mengatur mengenai dokter umum, dokter spesialis, dan dokter sub spesialis. Profesi dokter layanan primer justru dinilai akan menghambat dan melanggar akses pelayanan dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep pengaturan dokter layanan primer dalam UU tentang Pendidikan Kedokteran dan sinkronisasinya dengan UU tentang Praktik Kedokteran serta implikasi hukum keberadaan dokter layanan primer dalam praktik kedokteran di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap prinsip dasar negara dalam mewujudkan jaminan kesehatan melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, sistem pelayanan kesehatan primer, serta peraturan perundang-undangan. Keberadaan dokter layanan primer memberikan perubahan pada penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang menimbulkan implikasi hukum. Hal ini terutama berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan profesi dokter layanan primer, mencakup standar pendidikan profesi, pelaksanaan uji kompetensi, pemberian sertifikat kompetensi, penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan, dan penyiapan rumah sakit pendidikan.

Kata kunci: dokter layanan primer, pendidikan kedokteran, prinsip praktik kedokteran

Primary Care Doctor: Analysis Toward the Law Number 20 Year 2013 on Medical Education

Prodigy Journal Vol. 5 No. 1, July 2017, page 68 - 79

The primary care doctor is a new profession regulated in Law Number 20 Year 2013 on Medical Education. The existence of primary care doctor is indispensable in line with the application of the National Health Insurance (JKN) in the National Social Security System (SJSN) which requires that the service flow be initiated from primary health care, such as community based health care, primary clinics, and independent medical practice. However, the problems that arise are the concept of regulating primary care doctor in the Law Number 20 Year 2013 and its synchronization with Law Number 29 Year 2004 on Medical Practice which only regulates general practitioner, specialist, and sub-specialist. The profession of primary care doctor is assessed to inhibit access of general practitioner in services at primary health care facilities. This article aims to find out the concept of primary care doctor that has been regulated in the Law Number 20 Year 2013 and its synchronization with the Law Number 24 Year 2004 as well as the implication of the law of the existence of primary care doctor in medical practice in Indonesia. This article is legal normative study that uses normative juridical methods which analyze the basic principles of the state in realizing health insurance through the implementation of national social security system and primary health care system in term of legislation perspective. The existence of primary care doctor has influenced the provision of medical education that have legal implications. This is especially in relation to the provision of professional education of primary care doctor, including professional education standards, competence test and certificate, procurement of necessary facilities and infrastructure, as well as procurement of educational hospitals.

Keywords: primary care doctor, medical education, principles of medical practice

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO.1, JULI 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Akhmad Aulawi

Badan Keahlian DPR RI

Aspek Hukum Pembentukan Bank Wakaf Ventura

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 1, Juli 2017, halaman 80 - 94

Indonesia sebagai salah satu negara muslim terbesar memiliki potensi ekonomi yang tinggi, salah satunya melalui keberadaan wakaf. Potensi ekonomi ini belum dimaksimalkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah bersama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia menginisiasi sebuah lembaga keuangan syariah yaitu bank wakaf ventura untuk mengelola dana wakaf yang beredar untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk hukum, legalitas pendirian, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dibentuknya bank wakaf ventura. Tujuan penulisan untuk mengetahui aspek bentuk hukum, legalitas pendirian, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan dengan dibentuknya bank wakaf ventura. Metode penulisan disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis dalam tulisan ini disimpulkan bahwa pembentukan bank wakaf ventura dilakukan dengan bentuk hukum perusahaan modal ventura syariah dengan aspek legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu pembentukan bank wakaf ventura perlu disinkronisasikan dengan undang-undang yang terkait.

Kata kunci: keuangan syariah, wakaf, modal ventura

Legal Aspects of Waqf Ventura Bank Formation

Prodigy Journal Vol. 5 No. 1, July 2017, page 80 - 94

Indonesia as one of the largest Muslim countries has high economic potential, including waqf. This economic potential has not been maximized for the economic welfare of the people. The government, together with the Indonesian Muslim Intellectual Association has initiated a syariah financial institution which is a "venture waqf bank" to manage waqf funds in circulation for the welfare and economic improvement of the community. The problems are regarding the legal form, the legality of the establishment, and synchronization with the laws and regulations related to the establishment of a "venture waqf bank". The purpose of this writing is to know the legal aspects of legal form, the legality of the establishment, as well as synchronization with the legislation with the establishment of "venture waqf bank". This writing uses normative juridical approach to review the sources of literatures and assessment of legislations. Based on the analysis, it concludes that legal identity of "venture waqf bank" is done with the form of sharia venture capital company that should be in accordance with legislation especially the Regulation of the Financial Services Authority. In addition, the establishment of "venture waqf bank" needs to be synchronized with the related laws.

Keywords: sharia financial, waqf, venture capital

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO.1, JULI 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Wiwin Sri Rahyani

Badan Keahlian DPR RI

Menelaah Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial dalam Regulasi Perbankan

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 1, Juli 2017, halaman 95 - 105

Konsekuensi terbentuknya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakibatkan pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) kepada OJK. Meskipun kewenangan BI untuk melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan telah dialihkan, BI tetap memiliki kompetensi untuk memeriksa hal-hal yang terkait dengan makroprudensial bank dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun permasalahan dalam tulisan ini meliputi pengertian kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial serta irisannya terhadap kedua kebijakan tersebut serta penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dalam regulasi perbankan. Sedangkan tujuan penulisan untuk mengetahui pengertian kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial serta irisannya terhadap kedua kebijakan tersebut serta penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dalam regulasi perbankan. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yang bertitik tolak dari hukum positif lalu dianalisis secara kualitatif untuk menarik simpulan. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu BI untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan. Dengan demikian terdapat dua institusi yaitu BI dan OJK yang memiliki kompetensi atas pengaturan dan pengawasan bank. Oleh karena itu, perlu ada harmonisasi dan koordinasi yang baik antara BI dan OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap bank agar masalah tersebut tidak menyulitkan bank karena adanya tumpang tindih. Sebaiknya pengaturan soal ruang lingkup mikroprudensial dan ruang lingkup makroprudensial dicantumkan dalam perubahan Undang-Undang tentang Perbankan.

Kata kunci: makroprudensial, mikroprudensial, perbankan

Study on Macroprudential and Microprudential Policies in Banking Regulation

Prodigy Journal Vol. 5 No. 1, July 2017, page 95 - 105

*As a result of the formation of the Law on OJK, the regulation and supervision of the banks switch from BI to OJK. Although BI's authority to regulate and supervise banks has been transferred, BI retains the competence to examine matters related to the macroprudential bank in order to carry out its duties to maintain financial system stability. Regulation and supervision on institutional, health, prudential aspects, and bank inspections are the scope of microprudential regulation and supervision which is the duty and authority of OJK. There are problems regarding the understanding of macroprudential and microprudential policy and its inclination to both policies and the implementation of macroprudential and microprudential policy in banking regulation. The purpose of this writing is to know the understanding of macroprudential and microprudential policy and its inclination to both the policy as well as the implementation of macroprudential and microprudential policy in banking regulation. Writing method used is the method of normative law. The specification of writing is descriptive analytical. The method of data analysis is done by qualitative juridical, starting from positive law and then analyzed qualitatively to draw the conclusion. In order to regulate and supervise macroprudential, OJK assist BI to conduct moral appeal (*moral suasion*) to the banking. So there are two institutions namely BI and OJK that have competence on bank regulation and supervision. Therefore, it needs to be a good harmonization and coordination between BI and OJK in arranging and supervising the bank so that the problem does not complicate the bank due to overlapping. The scope of microprudential and macroprudential should be included clearly in the amendment to the Law on Banking.*

Keywords: macroprudential, microprudential, banking

PRODIGY
JURNAL PERUNDANG-UNDANGAN

VOL. 5 NO.1, JULI 2017

ISSN 2356-1106

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar Abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

R. Priharta Budiprasetya E.P.Y

Badan Keahlian DPR RI

Tinjauan Yuridis Sistem Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jurnal Prodigy Vol. 5 No. 1, Juli 2017, halaman 106 - 116

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam perkembangannya terdapat pembentukan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Namun demikian terbitnya undang-undang tersebut masih menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap berbagai pengaturan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Berdasarkan hal tersebut terdapat permasalahan yaitu apakah perbedaan antara pemilihan kepala daerah di pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa di Indonesia dan bagaimana keistimewaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui perbedaan pemilihan kepala daerah di pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan yang bersifat istimewa di Indonesia dan mengetahui keistimewaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji substansi dan hukum positif yang mengatur mengenai sistem pemilihan kepala daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa. Simpulan dari permasalahan ini bahwa perbedaan pemilihan kepala daerah di pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya terletak pada mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu pemilihan kepala daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi istimewa dikarenakan adanya perbedaan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur.

Kata kunci: kepala daerah, bersifat khusus, bersifat istimewa

Juridical Review of The Election System of The Special Region of Yogyakarta Province

Prodigy Journal Vol. 5 No. 1, July 2017, page 128 -140

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a unitary state which is divided into provinces and regencies/municipalities. In its development there is the formation of local government units that are specific nature or special nature regulated by law. Nevertheless, the issuance of the law still creates a misunderstanding towards various regulation on special local governments or special nature. Based on this matter there are problems that are whether the difference between the election of regional heads in local governments with specific nature with the one which is special nature in Indonesia and how to privilege the election of regional heads in the Province of Yogyakarta Special Region. The purpose of this paper is to know the difference of regional heads election in local government that has specific nature with the one which is special nature in Indonesia and know the privilege of election of regional heads in Province of Special Region of Yogyakarta. The discussion in this paper uses normative juridical approach method by examining the substance and positive law that regulate the system of elections of regional heads that has specific nature or the one which is special nature. The conclusion of this problems is that the difference of the election of regional heads in a special region government that is Special Province of Yogyakarta only lies in mechanism of filling the position of Governor and Vice Governor in Province of Special Region of Yogyakarta. In addition, the election of regional heads in the Special Province of Yogyakarta became special because of the difference in the mechanism of filling the position of Governor and Vice Governor of the Special Province of Yogyakarta, namely the candidate for Governor and candidate for Vice Governor in the Special Province of Yogyakarta should reign as Sultan Hamengku Buwono for the candidate of Governor and reign as Duke of Paku Alam for the Vice-Governor candidate.

Keywords: regional heads, specific nature, special nature